



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI BANGKA BELITUNG
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2012-2013**

*

**

**

*

JAKARTA 2012



L A P O R A N
HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR-RI
KE PROVINSI BANGKA BELITUNG
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2012-2013
TANGGAL 18 S.D. 20 DESEMBER 2012

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata tertib.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Fraksi-Fraksi tanggal 22 Oktober 2012.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 20 November 2012.
4. Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI tanggal 5 Desember 2012

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kunjungan lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait lainnya serta *stake holder* terkait dengan realisasi dan pelaksanaan pembangunan sektor bidang Komisi IV DPR RI di Provinsi Bangka Belitung, serta dukungan dan sinkronisasinya dengan program - program pembangunan Pemerintah Daerah.
2. Berdialog langsung dengan masyarakat dan melihat langsung di lapangan realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang Komisi IV DPR RI di Provinsi Bangka Belitung.
3. Mendapatkan informasi langsung tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek legislasi (peraturan perundang-undangan), anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah bidang Komisi IV DPR RI dan alternatif pemecahan masalahnya.
4. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program pemerintah terkait bidang Komisi IV DPR RI pada tahun-tahun mendatang.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	DRS. H. IBNU MULTAZAM	KETUA TIM/F-PKB
2	H. DARIZAL BASIR	ANGGOTA/F-PD
3	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.IP.	ANGGOTA/F-PD
4	DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si	ANGGOTA/F-PD
5	DR. MOHAMAD JAFAR HAFSAH	ANGGOTA/F-PD
6	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH.	ANGGOTA/F-PG
7	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	ANGGOTA/F-PG
8	ADI SUKEMI, ST., MM.	ANGGOTA/F-PG
9	IR. H. MARSANTO, MS.	ANGGOTA/F-PDI-P
10	HONING SANNY	ANGGOTA/F-PDI-P
11	KH. IR. ABDUL HAKIM	ANGGOTA/F-PKS
12	MA'MUR HASANUDIN, MA	ANGGOTA/F-PKS
13	DRS. H. WAN ABU BAKAR, MS.	ANGGOTA/F-PPP
14	SYAIFULLAH TAMLIHA	ANGGOTA/F-PPP
15	PEGGI PATRICIA PATTIPI	ANGGOTA/F-PKB
16	ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA	ANGGOTA/F-GERINDRA

D. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Bangka Belitung dilaksanakan pada hari Selasa - Kamis, tanggal 18 - 20 Desember 2012.

E. ACARA SELAMA KUNJUNGAN

Acara dan lokasi yang dikunjungi dalam kunjungan kerja Tim Anggota Komisi IV DPR RI di Provinsi Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung beserta jajarannya, diwakili oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung;
2. Peninjauan Gudang Bulog Subdivre Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Peninjauan Kelompok Penerima Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Namang, Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. ;
4. Peninjauan Areal Perluasan Lada di Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
5. Peninjauan Gudang Pupuk Pusri di Pangkalpinang;
6. Pertemuan dengan Bupati Bangka dan Pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, diikuti kunjungan ke PPN Sungailiat;

F. GAMBARAN UMUM

1. **Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung beserta jajarannya, diwakili oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung**, beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:

Provinsi Bangka Belitung (Bangka Belitung) dibentuk menjadi provinsi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000, pertama kali terdiri atas 2 kabupaten 1 kota. Sekarang provinsi Bangka Belitung mempunyai 6 kabupaten 1 kota. Jumlah penduduk pada tahun 2011 dilaporkan sebanyak ± 1.261.737 jiwa.

Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan, luas wilayah mencapai 81.725,14 km² yang terdiri atas wilayah daratan seluas 16.424,14 km² (20,10%) dan wilayah laut seluas 65.301,00 km² (79,90%) dengan jumlah pulau 950 pulau. Oleh karena itu provinsi ini bersama 6 provinsi kepulauan lainnya sedang mengajukan UU Daerah Kepulauan untuk mendapatkan perimbangan DAK yang setara dengan provinsi Daratan.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2012 diproyeksikan mencapai 6,54 %, sedangkan prediksi 2013 akan tumbuh 6,75%. Sektor unggulan Provinsi Bangka Belitung pertanian & perkebunan, kelautan & perikanan, pariwisata, pertambangan dan industri pengolahan. Sektor unggulan Provinsi Bangka Belitung fokus pada industri pengolahan (timah). Peranan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 sebesar 18,4%, terdiri dari Perikanan (6,88%), Perkebunan (5,73%), Tabama (4,97%), Peternakan (0,51%) dan Kehutanan (0,31%).

Sektor Pertanian

Target swasembada dan swasembada berkelanjutan lima komoditas pangan utama tahun 2012 Provinsi Bangka Belitung antara lain Padi (40.850

ton), Jagung (2.337 ton), dan daging sapi (2.764 ton). Alokasi anggaran untuk Provinsi Bangka Belitung dari Kementerian Pertanian tahun 2012 sebesar 35,65 miliar.

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bangka Belitung ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya, serta mendorong pengembangan ekonomi di daerah. DAK Provinsi Bangka Belitung dari KKP tahun 2012 sebesar 86 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 DAK sementara dialokasikan sebanyak 36 miliar. Alokasi terbesar pada tahun 2012 adalah untuk PPN Sungai Liat sebesar Rp.11,27 miliar dan PPN Tanjung Pandan sebesar Rp.10,3 miliar. Pada tahun 2013 alokasi untuk kedua PPN tersebut masing-masing sebesar Rp.10,73 miliar dan Rp.16,07 miliar.

Sektor Kehutanan

Di Provinsi Bangka Belitung terdapat 2 unit satker Kemenhut: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang dan BP DAS Baturusa Cerucuk. Alokasi anggaran Provinsi Bangka Belitung dari Kemenhut tahun 2012 sebesar Rp.49,46 miliar, meliputi UPT Rp.36,79 miliar, Dekonsentrasi Rp.4,28 miliar dan DAK sebesar Rp.8,39 miliar. Untuk tahun 2013 direncanakan alokasi meningkat sebesar Rp.55,62 miliar meliputi UPT Rp.40,25 miliar, Dekonsentrasi Rp.4,27 miliar dan DAK sebesar Rp.11,1 miliar. Permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Bangka Belitung terkait kehutanan yaitu belum jelasnya masalah tata batas hutan, sehingga mempersulit dalam penunjukan dan penyusunan RTRWP Bangka Belitung.

Demikian berbagai permasalahan di Provinsi Bangka Belitung terkait dengan sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, kelautan dan Perikanan serta Ketahanan Pangan untuk mendapat perhatian dari Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI.

2. Peninjauan Gudang Bulog Subdivre Bangka Belitung di Pangkalpinang; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Peninjauan dilakukan di 2 unit gudang yang ada di gudang Bulog Sub Divre Bangka Belitung di Pangkalpinang. Pada saat kunjungan gudang tampak sudah kosong. Stok beras habis karena Raskin tahun 2012 sudah terealisasi. Beberapa ton beras masih tertinggal untukantisipasi stok bulan Januari 2013. Beras Raskin yang dibagikan didatangkan dari Tuban-Jawa Timur. Pengadaan beras didatangkan dari luar daerah karena daerah Bangka Belitung merupakan daerah defisit beras.

3. Peninjauan Kelompok Penerima Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Namang, Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah; beberapa hal penting yang disampaikan oleh masyarakat melalui Kepala Desa antara lain:

Program KBR yang dilakukan oleh kelompok yang dikunjungi telah terealisasi 100% dengan jumlah bibit yang semai sejumlah 50.000 bibit. Jenis pohon yang disemaikan adalah jenis gaharu dan beberapa tanaman lokal langka di Bangka Belitung seperti pohon Pelawan antara lain pelawan kiring *Tristania obovata*, pelawan merah *T. mainganyi*, dan kayu mulu *T. sumatrana*. Bibit rencananya akan ditanam di hutan sekitar lokasi yang saat ini telah dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kegiatan pemanfaatan non-kayu, misalnya pemanfaatan lebah madu pahit pelawan.

Pelaksanaan KBR di lokasi tersebut didasari keinginan masyarakat menanam di lahan kritis atau lahan kosong dan lahan tidak produktif dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut juga dapat memberikan hasil berupa kayu, getah, buah, serat, pakan ternak, dan lain sebagainya. Jumlah KBR di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2011 adalah 58 unit dan tahun 2012 adalah 74 unit.

Aspirasi yang disampaikan oleh para pesemai program KBR adalah bantuan pendampingan dan bimbingan teknis dalam menangani permasalahan: lokasi tanam, jenis, kualitas bibit, biaya pemeliharaan dan tanam.

4. Peninjauan Areal Perluasan Lada di Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Kunjungan areal perluasan lada dilakukan di Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Luas lahan lokasi yang dikunjungi adalah 12,5 Ha, yang dikelola oleh kelompok petani lada beranggotakan 25 orang, sehingga setiap orang mengelola 0,5 ha. Status tanah di areal perluasan lada adalah Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kawasan perkebunan.

Pada awalnya lahan perluasan merupakan semak belukar bekas peladang berpindah. Saat ini status lahan menjadi milik petani dengan bukti kepemilikan berupa catatan surat kebun milik petani yang dikeluarkan oleh kepala desa. Total luasan cetak sawah di Kabupaten Bangka Selatan yang dibiayai oleh Kementerian Pertanian mencapai 300 Ha dengan biaya Rp.10 juta per hektar. Tanah yang digunakan untuk cetak sawah menggunakan areal APL.

Disampaikan bahwa petani lada dalam 1 hektar dapat menghasilkan 2 ton per tahun. Jika harga lada rata-rata Rp.78.000,- per kilogram, maka pendapatan yang bisa diperoleh petani lada mencapai Rp. 156 juta/tahun, artinya potensi penghasilan petani lada per hektarnya dapat mencapai Rp.14 juta/bulan. Jika dalam kelompok tani setiap petani mengelola 0,5 hektar maka potensi penghasilan per bulannya mencapai Rp. 7 juta per bulan.

Ketua kelompok Tani Bukit Indah menyampaikan kendala yang dihadapi petani lada adalah masalah jalan dari kampung ke lokasi lahan yang tidak layak untuk dilalui. Di sepanjang jalan menuju lokasi budidaya telah dibangun jembatan sepanjang 27 meter atas swadaya kelompok. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah dapat membantu pembangunan jalan usaha tani. Atas permintaan Komisi IV, Kementan akan mengalokasikan anggaran untuk jalan usaha tani di Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2013.

Terkait dengan pertanyaan bagaimana pemerintah bisa memperhatikan anggota kelompok lada lainnya yg belum mendapatkan bantuan, apakah ada alokasi untuk 2013 ?. Kepala Dinas Kabupaten Bangka Selatan menyampaikan bahwa ada tahun 2013 Pemerintah telah mengalokasikan 100 hektar perluasan tanaman lada untuk Kabupaten Bangka Selatan, namun di prioritaskan untuk lokasi sentra budidaya pala di kecamatan lain. Komisi IV DPR RI menyarankan agar petani di desa Serdang Kecamatan Toboali untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pertanian ladanya agar pada tahun 2014 dapat menjadi sasaran program dan bantuan berikutnya.

Terkait dengan areal yang menurut keterangan pejabat setempat merupakan areal perluasan sawah, Komisi IV DPR RI akan melakukan Kunker Spesifik pada Juli 2013 di Desa Bencah Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dengan agenda melihat realisasi cetak sawah yang pada saat kunjungan diduga bukan merupakan lahan cetak sawah.

5. Peninjauan Gudang Pupuk Pusri di Pangkalpinang; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Pupuk Urea bersubsidi yang berada di Gudang Pupuk Pusri Pangkalpinang berasal dari Bontang. Pada waktu kunjungan ke Gudang Pupuk, ditemukan masih banyak pupuk bersubsidi yang belum diberi warna pink. Selama peninjauan juga dijumpai pupuk organik, namun Komisi IV menemukan bahwa asal-usul mitra produsen pupuk organik belum tertulis secara gamblang sebagaimana produsen Raskin, hanya dalam bentuk kode. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi Komisi IV pada rapat dengan Holding Pupuk.

Berdasarkan karakteristik pertanian di Provinsi Bangka Belitung, RDKK pupuk sekitar 80 persen adalah untuk Perkebunan, sisanya adalah untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Menurut pengelola gudang, RDKK tidak serta merta menjadi acuan gudang, tetapi juga mengacu SK Mentan dan SK Gubernur. Jika jumlah RDKK melebihi SK Mentan atau SK Gubernur, maka yg diikuti adalah SK Mentan/SK Gubernur. Pada tahun 2012 RDKK yang diajukan sebanyak 34.000 ton, namun kuota yang diberikan oleh SK Mentan sebanyak 20.000 ton. Meskipun keputusan jumlah penyaluran pupuk ditentukan oleh SK Mentan dan SK Gubernur, Komisi IV DPR RI memandang bahwa validasi RDKK tetap penting. Harga kios per kilo Rp. 1800,- sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Jumlah PPD (distributor) sebanyak 15 orang se Provinsi Bangka Belitung.

Komisi IV DPR RI memberikan arahan bahwa label Pupuk Organik agar tidak lagi dalam bentuk kode, namun berupa label nama produsen sebagaimana pada Raskin, agar jika ada masalah dengan produk bisa dilacak siapa pembuatnya. Untuk pupuk organik agar sebagian dapat dibuat oleh lokal dengan memberikan pendampingan, bimbingan dan pelatihan pembuatan Pupuk Organik.

Komisi IV DPR RI tidak menemukan instrumen kontrol apa yg bisa digunakan jika ada truk yg mengambil pupuk di gudang akan disalurkan kepada penerima subsidi yang berhak atau ke perkebunan/perusahaan yang tidak berhak menerima subsidi. Artinya pupuk bersubsidi dapat diambil sewaktu-waktu untuk kegunaan di luar sasaran target subsidi. Komisi IV DPR RI memandang perlu adanya evaluasi kebijakan subsidi, dan memperkuat instrumen pengawasan yg efektif terhadap pelaksanaan subsidi.

6. Pertemuan dengan Bupati Bangka dan Pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, diikuti kunjungan ke PPN Sungailiat ; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Bupati Bangka menyampaikan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian yang penting bagi Kabupaten Bangka. PPN Sungailiat pada awalnya adalah pelabuhan milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Total luas Pelabuhan saat itu adalah 48 Ha.

Kepala PPN Sungailiat menyampaikan bahwa saat ini PPN Sungailiat berencana untuk membangun pelabuhan untuk mengimbangi kemajuan dan visi pembangunan bidang perikanan di provinsi Bangka Belitung. Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan meliputi pengurukan sedimen dan pembangunan tanggul penahan gelombang. Selanjutnya Kepala PPN Sungailiat menyampaikan desain pembangunan pelabuhan Sungailiat

sebagai pertimbangan dalam pembahasan anggaran dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk proses pengerukan sedimentasi berupa pasir urug, rencananya akan dilakukan oleh swasta tanpa kompensasi. Namun perusahaan swasta tersebut akan menjual sedimen untuk proyek pengurukan di Ancol - Jakarta. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemda dan KKP dalam membangun PPN Sungailiat dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat, serta meminta kepada KKP untuk memberikan prioritas dukungan anggaran pada tahun 2013.

G. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam upaya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan di provinsi Bangka Belitung.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk
 - Membantu pembangunan jalan usaha tani bagi petani lada yang ada di Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada APBN Tahun 2013.
 - Terus memonitoring kemajuan program cetak sawah dan memberikan dukungan untuk sektor perkebunan lada yang menjadi gantungan hidup masyarakat petani yang ada di Provinsi Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan, yang menjadi sentra budidaya lada produktif, bernilai jual tinggi dan menjadi komoditas ekspor unggulan.
 - Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi serta memperkuat instrumen pengawasan yg efektif terhadap pelaksanaan subsidi.
 - Memberikan pembinaan pembuatan pupuk organik kepada masyarakat di Provinsi Bangka Belitung, sehingga pada jangka panjang, pupuk organik tidak lagi mendatangkan dari luar daerah, namun dapat disuplai oleh masyarakat / pelaku usaha lokal.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan dukungan alokasi anggaran untuk pembangunan PPN Sungailiat di Kabupaten Bangka dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk membantu Permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Bangka Belitung terkait kehutanan yaitu belum jelasnya masalah tata batas hutan, sehingga mempersulit dalam

penunjukan dan penyusunan RTRWP Bangka Belitung. Selain itu Komisi IV DPR RI juga Kementerian Kehutanan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada penerima program KBR terkait dengan beberapa kendala yang dihadapi, yaitu masalah lokasi tanam, jenis, peningkatan kualitas bibit, biaya pemeliharaan dan biaya tanam.

5. Komisi IV DPR RI bersama PT. Pupuk Indonesia Holding akan membahas pengaturan pelabelan pupuk organik yang diproduksi oleh para mitra PT. Pupuk Indonesia Holding untuk mempermudah pemantauan kualitas dan pelacakan (*traceability*) asal pupuk organik jika ditemui masalah di lapangan.

H. PENUTUP

Terhadap beberapa aspirasi dari mitra kerja/pemerintah daerah dan tanggapan dari Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung akan menindaklanjuti dengan menyampaikan baik pada saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI. Beberapa program pembangunan yang diusulkan langsung dan atau tertulis oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah selama kunjungan kerja ini agar dapat ditindak lanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait khususnya dalam APBN Tahun 2013.

Jakarta, 24 Desember 2012

KOMISI IV DPR RI
KETUA TIM,

DRS. H. IBNU MULTAZAM
A-